

---

**INOVASI PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM  
MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEMBIAYAAN PUSAT****Oleh****Rola Pola Anto<sup>1)</sup>, Muhammad Amir<sup>2)</sup>, Gunawan<sup>3)</sup>****<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia****<sup>2,3</sup>Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia****Email: [rola.polaanto70@gmail.com](mailto:rola.polaanto70@gmail.com)****Abstrak**

Fokus penelitian ini adalah inovasi kemampuan keuangan daerah dalam mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan pusat. Studi ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui inovasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang baru. Ketergantungan daerah terhadap pembiayaan pusat menjadi masalah yang menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru menjadi pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan beberapa inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat yakni pemerintah daerah melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai, melakukan pembangunan pasar baru Ibukota dan disetiap ibukota kecamatan, sistem jemput bola (proaktif), sistem pelayanan online, mengembangkan objek wisata baru, dan melakukan kerjasama organisasi perangkat daerah dalam sosialisasi dan penagihan pajak, membuat regulasi baru penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan, inovasi kapasitas masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat. Secara praktis hasil studi ini dapat memberi kontribusi pada pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat. Selain itu, hasil studi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep inovasi peningkatan pendapatan daerah.

**Kata kunci : Inovasi, Kemampuan Keuangan, Pembiayaan Pusat****PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur sumber keuangan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis pembagian subsidi pusat kepada Daerah. Esensi dari regulasi ini bahwa pembagian sumber keuangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota menganut sistem atau asas pemisahan terikat (Said, 2019).

Otonomi daerah bertujuan melakukan pengaturan pemerintahan dan pengaturan sumber-sumber keuangan daerah yang dapat menciptakan kemandirian daerah. Selain itu,

otonomi daerah dapat mempercepat proses pembangunan dalam berbagai aspek untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain serta terciptanya keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk mencapai harapan tersebut maka upaya menciptakan kemandirian daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dimensi penting untuk membuat perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah secara bertahap.

Upaya setiap daerah wajib meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada

pembiayaan pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena itu melalui otonomi daerah maka pemerintah daerah harus berusaha menggali potensi-potensi daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang baru untuk pembiayaan pembangunan daerah agar terhindar dari ketergantungan pembiayaan pusat (Oki et al, 2020).

Studi Said (2019) di Kabupaten Konawe Utara bahwa secara empirik strategi mengatasi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan pusat yakni melakukan (1) intensifikasi peningkatan PAD Pola Intensifikasi peningkatan pendapatan dilakukan dengan lebih menekankan pada penerapan nilai atau prinsip-prinsip perpajakan yang baik. Khusus di Kabupaten Konawe Utara Intensifikasi peningkatan PAD dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. (2) Ekstensifikasi Peningkatan PAD Pada pola Ekstensifikasi peningkatan pendapatan pemerintah daerah dilakukan dengan lebih menekankan pada perluasan sumber-sumber pendapatan baru.

Namun demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar, sehingga setiap daerah otonomi dapat meminimalisir tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah khususnya dalam hal kemandirian keuangan, pada dasarnya belum dapat terselenggara secara optimal (Saputra dan Fernando (2017).

Ketergantungan pembiayaan pusat bagi daerah otonomi daerah karena belum mampu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil studi Horota et al (2017) di Kabupaten Jayapura bahwa kontribusi PAD masih relatif rendah disebabkan oleh

kurangnya memanfaatkan sumber-sumber potensi PAD, terutama pajak dan retribusi daerah. Padahal Kabupaten Jayapura memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar namun belum dikembangkan dan dioptimalkan pemungutannya selama ini, sehingga belum mampu memberikan kontribusi kepada PAD di Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih sangat kecil masih dibawah 50% dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tergolong rendah berdasarkan rasio keuangan. Dimana rasio derajat desentralisasi berada dalam kategori sedang yaitu 26,34%. Rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dengan nilai rata-rata 67,78%. Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah atau menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan rata-rata 38,86% ((Saputra dan Fernando (2017).

Hasil studi yang dilakukan Oki et al, (2020) bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Belu dikategorikan sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah, hal ini mendorong tingginya rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Demikian juga rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah. Banyak potensi sumber daya alam seperti potensi sektor pertanian, peternakan, pertambangan, sumber daya laut, pariwisata dan lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Studi Hutajulu (2014) bahwa kontribusi dana perimbangan yang sangat besar pada pendapatan daerah menunjukkan tingginya ketergantungan daerah Kota Jayapura terhadap pendapatan bagi hasil. Pengeluaran publik cenderung mengalami peningkatan.

Relevan dengan kondisi empirik tersebut, maka daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada dasarnya masih

memiliki tingkat ketergantungan pada pusat dalam membiayai pembangunan daerah. Sebagai contoh daerah otonomi Kabupaten Bombana masih memiliki ketergantungan pembiayaan pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Sebagai contoh kontribusi kemampuan keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 4,94 % (sangat rendah) dan tingkat ketergantungan pusat sebesar 78 % (sangat tinggi), Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Bombana terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat rendah dan tingkat ketergantungan pembiayaan pusat sangat tinggi. Dapat juga digambarkan bahwa rata-rata kontribusi Kontribusi PAD Kabupaten Konawe Selatan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 5,43 % (sangat rendah) dan tingkat ketergantungan pusat sebesar 72,41 % (sangat tinggi). Kontribusi PAD Kabupaten Wakatobi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 3,92 % (sangat rendah) dan tingkat ketergantungan pusat sebesar 85,45 % (sangat tinggi) (berdasarkan data sekunder, 2018). Rendahnya kontribusi PAD tersebut menggambarkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk melakukan inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah masih minim sehingga banyak potensi-potensi sumber daya alam yang belum dilakukan penggalian sumber-sumber PAD (Data primer, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal dalam melakukan inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat. Upaya pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan sumber PAD pada dasarnya masih kurang mendapat perhatian, sehingga tujuan daerah otonomi untuk memajukan pembangunan daerah, penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang cepat belum dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat, dengan menekankan pada dimensi inovasi kapasitas individu aparatur pemerintahan, inovasi kapasitas kelembagaan, inovasi kapasitas sistem dan inovasi kapasitas masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Inovasi

Suryani (2008:304) menyatakan bahwa inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.

Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Selanjutnya Mulyadi, et al (2016: 69), bahwa apabila berkeinginan melakukan sebuah inovasi dalam pelayanan publik penting diperhatikan dua hal yaitu kreativitas dan iklim kompetensi.

Muttaqin (2011) bahwa untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik sebagai upaya untuk membangun birokrasi pemerintahan dapat mempertimbangkan 4 hal yaitu: (1) kapasitas individu aparatur pemerintahan, (2) kapasitas kelembagaan, (3) kapasitas sistem dan (4) kapasitas masyarakat (Mulyadi, et al (2016: 69).

### Inovasi Kemampuan Keuangan Daerah

Banga (2017: 108) bahwa sejalan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah maka daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui PAD. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah daerah

harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pengelolaan PAD.

Pendekatan inovatif menurut Mulyadi, et.al., (2016) memerlukan kemampuan manajemen kepala daerah untuk mewujudkan inovasi birokrasi pemerintahan melalui empat komponen kapasitas inovatif birokrasi, yaitu: (1) kapasitas individu aparatur birokrasi, (2) kapasitas kelembagaan pemerintah, (3) kapasitas lingkungan/masyarakat, dan (4) sistem yang kompatibel.

### **Sumber-sumber Keuangan Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah. (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Banga, 2017: 92).

Halim (2001:36) menyatakan pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Muluk (2009: 143) bahwa PAD merupakan pendapatan yang harus ditentukan dan dikumpulkan secara lokal.

Selanjutnya pendapatan daerah adalah semua jenis penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana bagi hasil maupun laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah (Banga (2017: 90).

### **Ketergantungan Pembiayaan Pusat**

Menurut Adisasmita (2011: 148) bahwa sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi, kedua sumber ini sangat tergantung pada pemerintah pusat, sumber keuangan tersebut diurus dan diatur oleh pusat. Daerah hanya boleh mengatur dan mengurus sepanjang pusat ada pengesahan dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tingkat ketergantungan akan lebih

besar, apabila: (1) terdapat keengganan pusat untuk menyerahkan sumber pendapatan kepada daerah, (2) Pusat berpendapat bahwa pajak daerah tertentu secara politik bisa menguntungkan sehingga dilakukan pembatasan, dan digantikan bantuan (*grant*), dan (3) Sumber-sumber pendapatan daerah sangat terbatas.

Faktor-faktor lain yang menimbulkan ketergantungan yang kuat, misalnya: (1) PAD terutama tertumpuk pada pajak dan retribusi daerah, dan (2) secara normal, cukup banyak jenis-jenis pajak daerah maupun sejumlah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah meskipun demikian, hasil pungutan tersebut tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan (Adisasmita, 2011: 149).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena Kabupaten Bombana merupakan salah satu Daerah Otonomi di Sulawesi Tenggara yang memiliki ketergantungan pada pembiayaan pusat. Informan penelitian ini terdiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan PR, DPM-PTSP.

Metode pengumpulan data penelitian melalui teknik wawancara mendalam, studi dokumen. Analisis data penelitian dengan menggunakan metode analisis data interaktif (Miles dan Huberman) melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/kesimpulan (Silalahi, Ulber, 2017). Melalui analisis data tersebut dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yakni untuk mengetahui inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat di Kabupaten Bombana.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian tentang inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat dapat dipaparkan sebagai berikut:

### **Inovasi Kapasitas Individu Aparatur Pemerintahan**

Salah satu dimensi penting dalam inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonom dalam mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan pusat adalah kapasitas individu aparatur pemerintah. Kapasitas atau kemampuan individu aparatur pemerintahan di daerah tidak lain adalah kemampuan yang dimiliki aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai kinerja yang baik bagi organisasinya. Karena itu pemerintah Kabupaten Bombana melakukan inovasi pada dua dimensi yaitu:

#### **Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai.**

Pada dasarnya kapasitas individu aparatur pemerintahan dalam merespon inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah membutuhkan banyak pengetahuan, kemampuan dan kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga kapasitas individu aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin baik. Karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penerimaan/pengelolaan PAD di Kabupaten Bombana telah melaksanakan inovasi peningkatan kapasitas individu yang memiliki tugas pada bidang pengelolaan dan penerimaan PAD di Kabupaten Bombana.

Inovasi kapasitas individu aparatur melalui pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sehingga

diharapkan terjadi peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti setiap unsur pimpinan dan pegawai pada dasarnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, karena setiap pegawai dapat menambah pengetahuan cara menggali potensi daerah menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan menerapkan model perencanaan, organising, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada setiap organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bombana.

#### **Peningkatan Kualitas Kerja.**

Inovasi yang terpenting dalam meningkatkan kapasitas individu aparatur pemerintahan daerah otonomi dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat adalah melakukan peningkatan kualitas kerja. Kapasitas individu aparatur pemerintahan daerah otonomi pada dasarnya harus ditingkatkan melalui inovasi peningkatan kapasitas aparatur dengan cara peningkatan kualitas kerja pada setiap OPD pengelola sumber-sumber PAD Kabupaten Bombana.

Peningkatan kualitas kerja dan kapasitas individu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dapat berdampak pada pencapaian kualitas kerja yang baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kerja pada beberapa organisasi perangkat daerah yang menerima dan mengelola sumber-sumber PAD di Kabupaten Bombana.

#### **Inovasi Kapasitas Kelembagaan**

Inovasi kemampuan keuangan daerah daerah otonomi telah dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Bombana yang mengelola pendapatan asli daerah melalui inovasi kapasitas kelembagaan seperti sumber daya, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan

sistem informasi dan manajemen. Inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi melalui inovasi kapasitas kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan daerah dari pembiayaan pusat. Adapun inovasi kapasitas kelembagaan pada Daerah otonomi Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

#### **Pembangunan Pasar.**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa salah satu inovasi kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bombana adalah melakukan pembangunan pasar baru di Ibukota dan wilayah kecamatan atau perdesaan serta melakukan rehab pasar yang sudah tidak layak digunakan pedagang di pasar.

Pembangunan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada dasarnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan pembangunan pasar baru adalah untuk mendorong peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi pasar dan penyewaan lods pasar. Temuan studi Inovasi kapasitas kelembagaan telah dilakukan OPD yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bombana.

Pembangunan pasar sebagai salah satu inovasi pemerintah daerah otonomi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bombana menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Organisasi Perangkat Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD Kabupaten Bombana. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan PAD, maka pemerintah Kabupaten Bombana melakukan kebijakan pembangunan pasar baru di beberapa kecamatan dan ibukota kabupaten dan secara otomatis dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Bombana.

dengan demikian dampak inovasi kapasitas kelembagaan melalui pembangunan pasar baru sangat membantu peningkatan PAD dan dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **Sistem Jemput Bola (Pro Aktif).**

Hasil studi ini dapat mengungkapkan fakta bahwa salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bombana dari dimensi inovasi kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Bombana adalah menerapkan pelayanan sistem jemput bola (pro aktif) yakni melakukan penagihan langsung pada wajib pajak. Sistem jemput bola aparat pemerintah lebih aktif (pro aktif) mengunjungi wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya yang telah jatuh tempo pembayaran tagihan. Aparatur yang berkunjung langsung akan melakukan dua hal penting yakni menagih secara langsung dan memberikan penyuluhan atau penindakan langsung.

Penerapan sistem menunggu wajib pajak berkunjung ke kantor menyebabkan banyak wajib pajak yang menunggak pajak seperti pajak hotel, restoran/rumah makan, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, Bea Penjualan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak bumi dan bangunan di daerah otonomi baru seperti Kabupaten Bombana.

Aparatur pada OPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah pro aktif mengunjungi wajib pajak untuk melakukan penagihan dan penindakan secara langsung atas pelanggaran tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bombana. Inovasi penagihan pajak sistem jemput bola yang dilakukan organisasi perangkat daerah pada dasarnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi sehingga PAD Kabupaten Bombana.

#### **Pelayanan Online.**

Inovasi kapasitas kelembagaan sebagai dimensi penting dalam inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat, yakni menerapkan sistem pelayanan online. Peran dan fungsi kelembagaan dalam suatu organisasi yang memberikan pelayanan pada masyarakat atau publik) dapat menerapkan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, cepat, tepat, efisien dan efektif serta profesional.

Inovasi kapasitas kelembagaan dalam mempercepat pelayanan publik dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, hal sering disebut dengan *e-government*. Hal ini merupakan tuntutan pelayanan era digital pada sektor pemerintahan (publik) yang cepat, efektif, dan efisien, terbuka, profesional, prima dan akuntabel.

Hasil studi ini dapat jelaskan bahwa inovasi kapasitas kelembagaan pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana yang telah dilakukan adalah terlaksananya sistem pelayanan online. Inovasi ini bertujuan untuk memperlancar pelayanan pada tingkat kecamatan yang memiliki rentang kendali cukup jauh dengan ibukota Kabupaten Bombana. Penerapan inovasi pelayanan sistem online sangat membantu aparatur dalam melaksanakan tugasnya di 22 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bombana. Pelayanan online dapat memberikan kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan prosedur pelayanan izin usaha. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa daerah otonomi Kabupaten Bombana telah ada inovasi kapasitas kelembagaan untuk memberikan pelayanan dengan sistem online pada masyarakat sebagai konsekuensi era digital yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*). Pelayanan sistem online (*e-service*) ini berdampak pada peningkatan PAD, yakni melayani pengurusan

beberapa jenis perizinan baik perorangan maupun perusahaan.

### **Pengembangan Objek Wisata Baru.**

Salah satu temuan penelitian dalam inovasi kapasitas kelembagaan sebagai upaya dalam inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi di Kabupaten Bombana dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat adalah pengembangan destinasi wisata baru.

Kabupaten Bombana adalah daerah yang memiliki keindahan alam dan memiliki ciri khas dari aspek sumber daya alam, budaya maupun masyarakat. Hal ini dapat menjadi potensi objek wisata baru yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber PAD. Dengan adanya objek wisata baru maka daerah otonomi dapat memperoleh sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini telah menemukan inovasi kapasitas kelembagaan telah dilakukan oleh pimpinan OPD melalui Dinas Pariwisata di Kabupaten Bombana. Pengembangan objek wisata baru merupakan kebijakan strategis yang diambil unsur pimpinan dan OPD dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Bombana.

Hasil penelitian inovasi kelembagaan melalui pengembangan objek wisata baru telah dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Bombana, yakni berhasil mengembangkan objek wisata alam seperti pulau, danau dan pesisir atau pantai. Dengan adanya destinasi wisata yang baru maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana dapat menarik pajak dan retribusi daerah pada objek wisata yang dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Dampak dari pengembangan destinasi wisata yakni dapat meningkatkan PAD yang akan datang. Objek wisata yang sering dikunjungi adalah objek wisata budaya Tangkeno, objek wisata pantai Rano Konea, Pulau Boto dan objek wisata danau Pogo-Pogo. Kabupaten Bombana memiliki 54 destinasi wisata yang

telah diidentifikasi. Pengembangan destinasi wisata baru di Kabupaten Bombana dapat meningkatkan PAD setiap tahun. Hasil studi ini sejalan pendapat (Banga 2017).

### **Membangun Kerjasama.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu inovasi kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bombana dapat dilakukan melalui kerjasama antara OPD yang melakukan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah secara bersama-sama ke lokasi dan memberi penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, melakukan penagihan secara langsung dan melakukan penindakan secara langsung. Kerjasama antar OPD memberi dampak positif bagi wajib pajak sehingga wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan tagihan pajak yang telah ditetapkan. Masyarakat yang menunggak pajak dapat membayar pajak langsung di kantor atau di bayar ditempat setelah mendapatkan penjelasan dari petugas yang melakukan sosialisasi.

Kerjasama OPD seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan perdagangan bagian dari inovasi kapasitas kelembagaan untuk peningkatan PAD Kabupaten Bombana.

### **Inovasi Kapasitas Sistem**

#### **Membuat Regulasi (Peraturan Daerah).**

Penelitian ini berhasil mengungkapkan fakta bahwa OPD Kabupaten Bombana dapat melakukan inovasi kapasitas sistem dengan cara membuat peraturan daerah tentang penarikan atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Inovasi kebijakan regulasi baru pajak dan retribusi daerah sangat dibutuhkan pemerintah Kabupaten Bombana

dapat menarik pajak dan retribusi dilandasi regulasi sebagai dasar hukum.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa inovasi kapasitas sistem melalui pembuatan regulasi baru di Kabupaten Bombana dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah atau pendapatan asli daerah dalam mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan pusat.

Regulasi terkait pajak dan retribusi sangat penting bagi pemerintah daerah otonomi Kabupaten Bombana untuk meningkatkan PAD sehingga masyarakat wajib pajak memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban dan haknya. Karena itu, peningkatan kemampuan keuangan daerah harus didukung dengan regulasi berupa peraturan daerah yang dibuat bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

### **Menaikkan Nilai Jual Objek Pajak.**

Salah satu inovasi kapasitas sistem untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi Kabupaten Bombana untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat adalah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang baru dan menghapus NJOP yang lama. Hal ini harus dilakukan karena NJOP yang lama sangat rendah. Peralihan kondisi wilayah yang awalnya ibukota kecamatan berubah menjadi Ibukota Kabupaten setelah pemekaran perlu ditinjau ulang kesesuaian NJOP. Inovasi kapasitas sistem ini dengan menaikkan NJOP PBB, merupakan langkah inovasi penyesuaian NJOP baru seperti nilai pajak bumi dan bangunan setelah pemekaran menjadi otonomi daerah. Dengan menaikkan NJOP dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bombana dari nilai objek PBB dapat meningkat sesuai dengan perubahan klaster tanah dan bangunan. Upaya perbaikan nilai jual objek pajak di Kabupaten Bombana dapat mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat.

### **Inovasi Kapasitas Masyarakat**

Hasil studi ini dapat mengungkapkan bahwa inovasi kapasitas masyarakat untuk inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi di Kabupaten Bombana, dapat dilaksanakan melalui cara berikut:

### **Sosialisasi Kepada Masyarakat.**

Sosialisasi pada wajib pajak atau masyarakat sebagai inovasi kapasitas masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan sosialisasi peraturan daerah yang relevan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan Kabupaten Bombana. Kemampuan keuangan daerah atau PAD dapat meningkat apabila pemerintah daerah berhasil melakukan perubahan sikap melalui inovasi kapasitas masyarakat. Peningkatan PAD harus diikuti adanya perubahan-perubahan sikap yang mendasar pada masyarakat, terutama dari sisi pengetahuan, kontrol, kerjasama dan proaktif.

Hasil studi ini menemukan bahwa inovasi kapasitas masyarakat dapat mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi atau PAD di Kabupaten Bombana. Pentingnya sosialisasi pada masyarakat yakni memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman kesadaran kepada wajib pajak agar dapat mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah dalam mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah dan mendorong kemajuan pembangunan daerah. Jika kapasitas masyarakat meningkatkan setelah sosialisasi dan penyuluhan, maka masyarakat akan lebih mudah sadar dan cepat membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan baik rumah pribadi maupun Izin Mendirikan Bangunan badan usaha. Pentingnya kapasitas masyarakat yang baik dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan sebagainya.

Dampak dari sosialisasi kepada masyarakat adalah meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Masyarakat menunggak pajak merupakan wajib pajak yang kurang kesadaran membayar pajak karena minimnya pengetahuan dan pemahaman pentingnya dan manfaatnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

Secara empiris inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bombana dalam mengurangi ketergantungan dengan pembiayaan dapat terlaksana karena adanya inovasi kapasitas individu aparatur pemerintahan, inovasi kapasitas kelembagaan, inovasi kapasitas sistem dan inovasi kapasitas masyarakat, hal ini relevan pendapat Muttaqin (2011) bahwa inovasi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi pemerintahan dapat mempertimbangkan 4 hal yaitu: (1) kapasitas individu aparatur pemerintahan, (2) kapasitas kelembagaan, (3) kapasitas sistem dan (4) kapasitas masyarakat (Mulyadi, et al (2016: 69).

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pusat, dapat disimpulkan bahwa: (1) inovasi kapasitas individu aparatur pemerintahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kualitas kerja pegawai. (b) inovasi kapasitas kelembagaan dilakukan melalui pembangunan pasar, menerapkan sistem jemput bola (pro aktif) dalam penagihan pajak dan retribusi daerah, sistem pelayanan online, mengembangkan objek wisata baru dan melakukan kerjasama OPD terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan dalam penagihan pajak dan retribusi daerah, (c) Inovasi kapasitas sistem dapat dilakukan dengan membuat regulasi seperti Peraturan Daerah dan menaikkan NJOP PBB di

perkotaan dan pedesaan, (d) inovasi kapasitas masyarakat ditempuh melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar memiliki pemahaman dan kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah atas usahanya untuk sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bombana.

### Saran

Studi ini fokus pada inovasi peningkatan kemampuan keuangan daerah otonomi di Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini masih terdapat kekurangan, yakni belum semua OPD memiliki tugas menerima pajak dan retribusi untuk diteliti karena keterbatasan waktu. Karena itu, ke depan peneliti selanjutnya dapat melakukan studi secara lengkap pada semua OPD yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bombana.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- [2] Banga, Wempy, 2017, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- [3] Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- [4] Horota, Parson; Riani, Purba; Ayu, Ida; dan Marbun, Robert. M., 2017, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura, *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 1
- [5] Hutajulu, Halomoan, 2014, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XVII (1) 2014, 21-46.
- [6] Muliadi, Deddy; Hendrikus; Gedeona; dan Afandi, Muhammad Nur, 2016, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik* Alfabeta, Bandung
- [6] Muluk, Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi Pemerintahan Daerah*”, Surabaya: ITS Press.
- [7] Oki, Kamilaus Konstanse; Frederic W. Nalle, Pricilia A.V. Meomanu, 2020, Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu (*Analysis of Regional Financial Independence Belu Regency*), *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, Vol 5 No. 2, 2020, 1-6
- [8] Said, La Ode Agus, (2019) Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Terhadap Dana Perimbangan Pusat, *Jurnal PUBLICUHO*, Vol.1 No.4, 2019. pp.43-57.
- [9] Saputra, Boni dan Fernando, Riki, 2017, Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (3), 2017, 1515-1534
- [10] Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- [11] Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Edisi ke-3
- [12] Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen; Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Yogyakarta:Graha Ilmu
- [13] Sutarno. 2012. *Serba Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta